

**Peran PNM Mekaar dalam Meningkatkan Political Empowerment
Perempuan Melalui Pendekatan Gendered Public Policy Analysis di
Kampung Lette Romang Lompoe Kabupaten Gowa**

***The Role of PNM Mekaar in Increasing Women's Political
Empowerment Through a Gendered Public Policy Analysis Approach in
Lette Romang Lompoe Village, Gowa Regency***

Muhammad Randhy Akbar

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Sultan Alauddin
No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
E-mail: randakbar@unismuh.ac.id

Nur Fadila Ainun Nisa

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Jl. Sultan Alauddin
No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
E-mail: nurfadilaainunnisa@gmail.com

ABSTRACT

Women's economic empowerment has become a crucial aspect of Indonesia's economic development. The Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar program was created to provide financial access without collateral and business mentorship for underprivileged women in rural areas. This study aims to analyze the role of PNM Mekaar in enhancing women's political empowerment in Lette Romang Lompoe Village, Gowa Regency, through a Gendered Public Policy Analysis approach. The findings indicate that although the program successfully improved women's economic independence, broader political empowerment has not been fully achieved. The main challenge in implementing this program is the social resistance to changes in gender roles in a society still strongly rooted in patriarchal norms. Therefore, a policy approach more sensitive to social and cultural dynamics, as well as increased oversight of loan usage, is necessary to ensure the sustainability of both economic and political empowerment for women.

Keywords: Economic Empowerment; Political Empowerment; Women; PNM Mekaar; Gendered Public Policy Analysis.

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hadir untuk memberikan akses pembiayaan tanpa agunan serta pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PNM Mekaar dalam meningkatkan political empowerment perempuan di Kampung Lette Romang Lompoe, Kabupaten Gowa, melalui pendekatan gendered public policy analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, pemberdayaan politik yang lebih luas belum tercapai secara optimal. Tantangan utama dalam implementasi program ini adalah resistensi sosial terhadap perubahan peran gender di masyarakat yang masih patriarkal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan.

Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi; Political Empowerment; Perempuan; PNM Mekaar; Gendered Public Policy Analysis.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, kontribusi perempuan terhadap ekonomi Indonesia semakin meningkat, terutama melalui pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Rahardjo, 2018). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, perempuan berkontribusi sebesar 60% dalam pengelolaan UMKM di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023). Namun, meskipun kontribusi perempuan terhadap perekonomian semakin besar, mereka masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian potensi penuh mereka dalam dunia usaha. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh perempuan dalam berwirausaha adalah keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka (Sundari, 2020). Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan, kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal, serta ketimpangan akses terhadap informasi dan pelatihan kewirausahaan sering kali menjadi hambatan utama (Ariani et al., 2024; Choerudin et al., 2023; Zalukhu et al., 2024).

Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hadir untuk mengatasi masalah tersebut, terutama bagi perempuan prasejahtera di daerah pedesaan. Diresmikan pada tahun 2015, PNM Mekaar bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan tanpa agunan dan pendampingan usaha kepada perempuan di Indonesia, termasuk di Kampung Lette Kelurahan Romang Lompoa, Kabupaten Gowa. Melalui pendekatan berbasis komunitas, PNM Mekaar memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mereka dan mencapai kemandirian ekonomi (PNM, 2020). Hal ini juga berkaitan erat dengan peningkatan pemberdayaan politik perempuan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini. Sebagai program yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, namun juga memberikan perempuan lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik, PNM Mekaar berpotensi memperkuat peran perempuan dalam pembangunan sosial dan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program PNM Mekaar di Kampung Lette Romang Lompoa, Kabupaten Gowa, berkontribusi terhadap peningkatan *political empowerment* perempuan, dengan menggunakan pendekatan *Gendered Public Policy Analysis*. Penelitian ini juga akan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitasnya di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiono, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program PNM Mekaar di Kampung Lette Romang Lompoa berkontribusi terhadap pemberdayaan politik perempuan dan dampaknya terhadap struktur sosial setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran program PNM Mekaar dalam memberdayakan perempuan di tingkat ekonomi dan politik, serta tantangan yang

dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi secara lebih luas dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat.

Informan penelitian terdiri dari penerima manfaat PNM Mekaar yang terlibat dalam kelompok usaha perempuan di Kampung Lette Romang Lompaa, seperti Kelompok Ibu Gaul 01, Kelompok Doa Ibu, Kelompok Pisang Ijo, Kelompok Kampung Lette, dan Kelompok Grand Sulawesi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengelola program PNM Mekaar setempat, aparat desa, dan tokoh masyarakat yang memiliki wawasan terkait implementasi program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta pengumpulan dokumen yang relevan dengan program ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Metode ini membantu peneliti memahami bagaimana perempuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari program dalam kehidupan sehari-hari mereka (Rizvi, 2015). Dokumentasi juga berperan penting, mencakup pengumpulan data sekunder seperti laporan program dan materi edukasi yang diberikan kepada peserta, yang memberikan latar belakang mengenai struktur dan tujuan program PNM Mekaar.

Setelah data terkumpul, analisis tematik akan dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Proses ini melibatkan pengkodean data untuk menemukan pola-pola signifikan terkait dampak program terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui pendekatan analisis tematik ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mendalam mengenai pengaruh PNM Mekaar terhadap kehidupan perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial. Kombinasi dari ketiga teknik pengumpulan data ini diharapkan memberikan gambaran holistik tentang dampak positif program terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di masyarakat (Moleong, 2021). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, yang akan membantu menarik kesimpulan tentang dampak program terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.

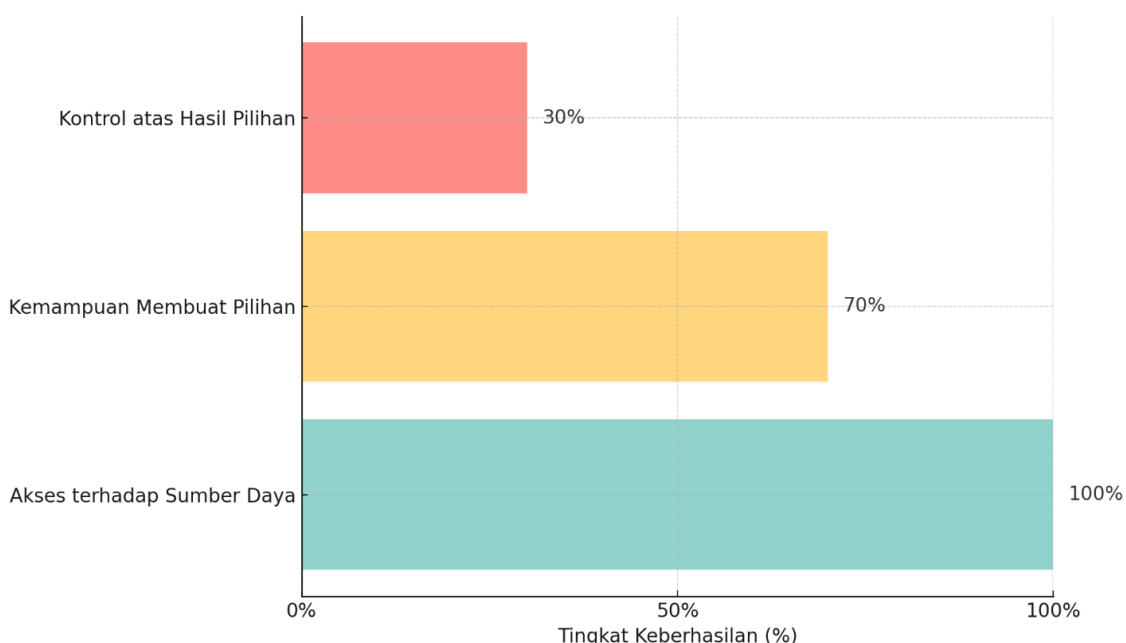
HASIL DAN PEMBAHASAN

Political empowerment mengacu pada peningkatan kapasitas perempuan untuk mempengaruhi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Rizvi, 2015). PNM Mekaar sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi memainkan peran penting dalam membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja dan berkontribusi secara aktif dalam perekonomian keluarga. Pada proses ini, perempuan yang sebelumnya terpinggirkan dalam aspek ekonomi mulai memiliki kekuatan ekonomi yang memberikan ruang untuk mengubah posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat (Rahardjo, 2018). Namun, pemberdayaan ekonomi ini, meskipun signifikan, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pemberdayaan politik yang lebih luas.

Sebagai bagian dari program mikrofinansial, PNM Mekaar menawarkan akses kepada perempuan yang terlibat dalam usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan dan pelatihan kewirausahaan. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh kapital ekonomi, yang sering kali menjadi batu loncatan untuk meningkatkan peran mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Pemberdayaan ekonomi

yang berasal dari akses keuangan ini memungkinkan perempuan untuk mengatur ekonomi keluarga, yang pada gilirannya memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga (Fairuza et al., 2023). Namun, perubahan peran ini tidak secara otomatis menjamin keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang lebih besar, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Kabeer (2014) mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam pemberdayaan, yaitu akses terhadap sumber daya, kemampuan untuk membuat pilihan, dan kontrol atas hasil dari pilihan tersebut. PNM Mekaar telah berhasil memberikan akses kepada perempuan terhadap sumber daya finansial, tetapi tantangan terbesar adalah memastikan bahwa perempuan juga memiliki kontrol penuh atas penggunaan dana tersebut. Beberapa anggota kelompok usaha perempuan mengungkapkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengelola dana pinjaman untuk tujuan usaha mereka, melainkan menggunakannya untuk membayar utang lain yang ada. Hal ini mencerminkan kurangnya kontrol atas hasil pilihan yang seharusnya digunakan untuk memperkuat usaha mereka, dan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi belum cukup untuk mencapai pemberdayaan politik.



Gambar 1. Analisis Dimensi Pemberdayaan

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Pada diagram analisis pemberdayaan di atas menggambarkan tiga dimensi penting, yaitu akses terhadap sumber daya, kemampuan membuat pilihan, dan kontrol atas hasil pilihan. Pada dimensi akses terhadap sumber daya, keberhasilan program PNM Mekaar sangat terlihat dengan capaian 100%, menunjukkan bahwa perempuan telah

memiliki akses yang baik terhadap dana pinjaman untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, pada dimensi kemampuan membuat pilihan, keberhasilan hanya mencapai 70%, karena meskipun perempuan memiliki akses, mereka masih menghadapi hambatan dalam mengambil keputusan secara mandiri terkait penggunaan dana tersebut. Tantangan terbesar terlihat pada dimensi kontrol atas hasil pilihan, dengan capaian hanya 30%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar perempuan belum mampu mengelola dana pinjaman secara optimal untuk tujuan usaha mereka. Sebaliknya, dana tersebut sering digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar utang atau membeli kebutuhan lain yang menghambat tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses ekonomi telah berhasil ditingkatkan, diperlukan upaya tambahan seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan pendampingan, untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam membuat pilihan dan mengontrol hasil dari keputusan mereka, sehingga pemberdayaan yang menyeluruh dapat tercapai.

Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berperan sebagai landasan untuk memberdayakan mereka dalam aspek politik. Program PNM Mekaar memberikan perempuan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, yang memberi mereka otonomi dan keberanian untuk terlibat dalam kegiatan yang lebih luas di luar rumah. Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Meskipun demikian, peran perempuan di Kampung Lette Romang Lompoa dalam kehidupan politik tetap terbatas.

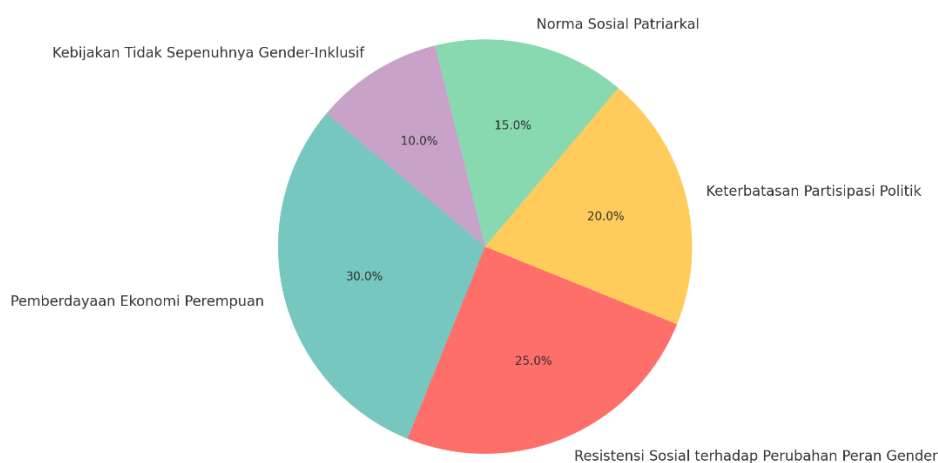
Perubahan sosial yang terjadi akibat meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan melalui program ini tidak serta merta mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Norma sosial patriarkal yang masih kental di daerah ini menyebabkan perempuan yang aktif dalam dunia ekonomi sering kali dianggap tidak sesuai dengan peran tradisional mereka sebagai ibu rumah tangga (Ruslan, 2010; Terminanto, 2024). Ketegangan antara peran ekonomi perempuan yang lebih aktif dan peran gender tradisional sering kali menghambat peningkatan partisipasi politik perempuan. Teori pemberdayaan politik yang dikembangkan oleh Lister (2003) dapat memberikan wawasan lebih dalam. Lister menyatakan bahwa pemberdayaan politik perempuan tidak hanya terkait dengan akses ke sumber daya, tetapi juga dengan perubahan dalam struktur sosial yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan *Gendered Public Policy Analysis* berfokus pada bagaimana kebijakan publik dapat memperkuat atau melemahkan peran perempuan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan dimensi gender dalam setiap kebijakan (Evans et al., 2021; Handayani, 2018). Program PNM Mekaar, meskipun berfokus pada pemberdayaan ekonomi, dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan ini untuk menilai apakah kebijakan tersebut mempertimbangkan secara menyeluruh dinamika gender yang ada di masyarakat. Analisis kebijakan yang berbasis gender memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kebijakan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam berwirausaha dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

PNM Mekaar pada dasarnya merupakan kebijakan yang cukup sensitif terhadap gender karena dirancang khusus untuk meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha. Namun, masalah muncul ketika kebijakan ini tidak mempertimbangkan secara mendalam norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, meskipun PNM Mekaar memberikan pembiayaan kepada perempuan, resistensi sosial terhadap peran perempuan dalam ekonomi sering kali menghambat penerimaan dan pengelolaan usaha mereka. Pada banyak kasus, perempuan yang menjadi penerima manfaat program ini harus menghadapi penolakan dari suami atau anggota keluarga lainnya, yang masih merasa bahwa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam pengelolaan usaha.

Pendekatan *Gendered Public Policy Analysis* menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada akses keuangan tanpa mempertimbangkan norma sosial yang ada di masyarakat mungkin tidak cukup untuk memberdayakan perempuan secara menyeluruh (Mulyantini & Indriasih, 2021). PNM Mekaar perlu beradaptasi dengan realitas sosial di mana perempuan seringkali harus berjuang untuk memperoleh dukungan dari keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan elemen pendidikan sosial dalam program ini, seperti pelatihan yang tidak hanya berfokus pada kewirausahaan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender di tingkat keluarga dan masyarakat (Terminanto, 2024). Melalui cara ini, perempuan tidak hanya diberikan akses ke sumber daya ekonomi, tetapi juga didorong untuk terlibat lebih aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

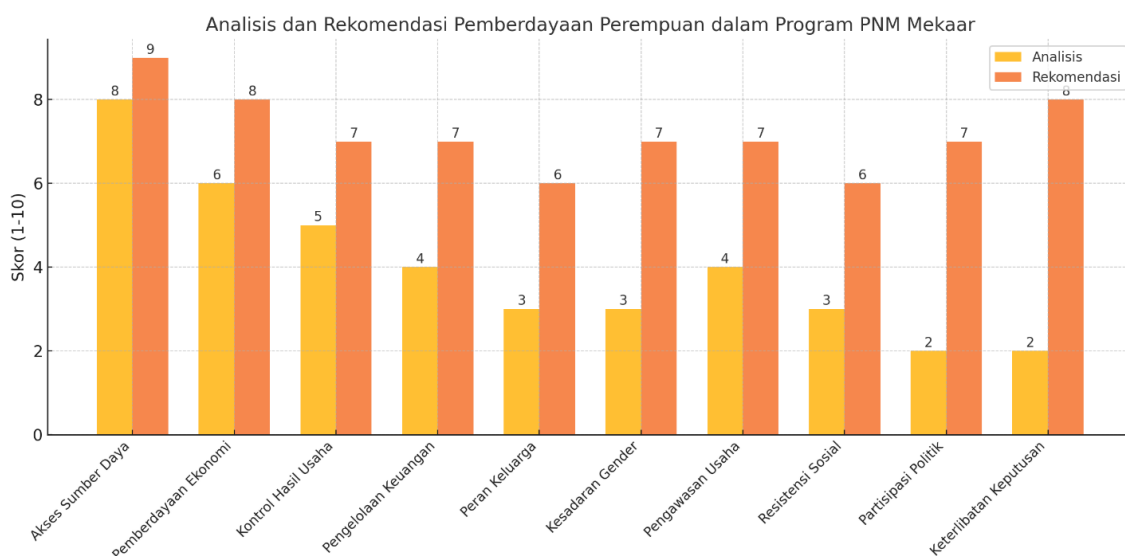
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan yang mengikuti program PNM Mekaar adalah resistensi terhadap perubahan peran gender yang terjadi di masyarakat. Ketegangan sosial ini sering kali terjadi di masyarakat yang masih mempertahankan norma patriarkal yang kuat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan *political empowerment* perempuan, kebijakan PNM Mekaar harus lebih sensitif terhadap perubahan sosial yang diperlukan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.



Gambar 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Perempuan dalam PNM Mekaar

Sumber: Data Diolah Penulis (2024)

Diagram di atas menggambarkan proporsi faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan perempuan dalam program PNM Mekaar. Faktor terbesar adalah pemberdayaan ekonomi perempuan (30%), yang menunjukkan peran penting akses ke sumber daya ekonomi sebagai landasan awal pemberdayaan. Namun, terdapat tantangan signifikan berupa resistensi sosial terhadap perubahan peran gender (25%), yang mencerminkan kuatnya norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan di luar rumah. Selain itu, keterbatasan partisipasi politik perempuan (20%) menjadi hambatan utama dalam upaya mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Norma sosial patriarkal (15%) juga memberikan pengaruh besar, karena persepsi tradisional sering kali membatasi perempuan untuk memainkan peran aktif di masyarakat. Terakhir, kelemahan dalam kebijakan yang tidak sepenuhnya gender-inklusif (10%) menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih peka terhadap dimensi gender. Secara keseluruhan, meskipun pemberdayaan ekonomi telah memberikan dampak positif, keberhasilan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh sangat dipengaruhi oleh tantangan sosial dan budaya yang masih kuat.



Gambar 3. Analisis dan Rekomendasi Pemberdayaan Perempuan dalam Program PNM Mandiri

Sumber: Data Diolah oleh Penulis

Diagram tersebut menunjukkan analisis dan rekomendasi pada berbagai aspek pemberdayaan perempuan dalam program PNM Mekaar. Akses sumber daya memiliki skor analisis tinggi (8) dan prioritas rekomendasi sangat penting (9), yang menekankan perlunya pendidikan kewirausahaan untuk memanfaatkan akses modal secara optimal. Pemberdayaan ekonomi meskipun tercapai, masih membutuhkan kontrol hasil usaha yang lebih baik dan pengelolaan keuangan, sebagaimana tercermin dari skor rekomendasi (8). Aspek kontrol hasil usaha dan pengelolaan keuangan juga memiliki skor analisis

cukup tinggi, dengan rekomendasi (7) yang menunjukkan pentingnya literasi keuangan dan pengawasan dana.

Aspek resistensi sosial dan kesadaran gender memiliki skor analisis lebih rendah, tetapi prioritas rekomendasi tinggi (6-7), menyoroti perlunya pendekatan sosial dan integrasi kesadaran gender dalam pelatihan. Di sisi lain, partisipasi politik dan keterlibatan dalam keputusan menunjukkan skor analisis rendah (2-3), tetapi skor rekomendasi yang tinggi (7-8) menegaskan urgensi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Secara keseluruhan, diagram ini menggarisbawahi bahwa meskipun pemberdayaan ekonomi cukup berhasil, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, kesadaran gender, dan dukungan sosial untuk mencapai pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis ini, program PNM Mekaar dalam meningkatkan pemberdayaan politik perempuan tidak hanya bergantung pada pemberian akses ke modal usaha, tetapi juga pada upaya untuk mengatasi hambatan sosial yang ada. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan *political empowerment* perempuan melalui program ini antara lain:

1. Pendidikan Sosial dan Kesadaran Gender: Program ini perlu mencakup elemen pendidikan yang lebih luas, tidak hanya tentang kewirausahaan, tetapi juga tentang kesadaran gender di tingkat keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perempuan yang terlibat dalam program dapat memperoleh dukungan lebih besar dari keluarga dan masyarakat sekitar mereka.
2. Pemberdayaan melalui Jaringan Sosial: PNM Mekaar dapat memperkuat jaringan sosial antar perempuan yang terlibat dalam program ini. Dengan menciptakan komunitas perempuan yang solid, para penerima manfaat dapat saling mendukung dan memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan memperkuat jaringan sosial, program ini mampu membangun komunitas perempuan yang saling mendukung dan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan. Komunitas yang solid dapat memberikan ruang untuk diskusi, pemecahan masalah bersama, hingga peluang kolaborasi bisnis kecil yang bermanfaat bagi anggota. Selain itu, komunitas ini dapat menjadi wadah pemberdayaan yang memperkuat kesadaran sosial dan politik perempuan. Mereka dapat belajar untuk lebih vokal dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun dalam pengambilan keputusan yang lebih luas. Dengan demikian, dampak dari program ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan sosial.
3. Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan Usaha: Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pinjaman. Program ini harus memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan usaha yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik

4. Inklusi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, penting bagi kebijakan ini untuk membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Melalui partisipasi aktif dalam proses tersebut, perempuan dapat meningkatkan peran mereka dalam kehidupan politik. Partisipasi perempuan dalam proses ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti kuota partisipasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan, pelatihan kepemimpinan politik berbasis gender, serta penguatan kapasitas perempuan dalam memahami isu-isu strategis yang memengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, penguatan forum dialog antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan juga dapat menjadi platform untuk mendukung keterlibatan aktif perempuan. Untuk hal yang lebih luas, inklusi ini mampu mendorong transformasi struktural yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional, tercipta peluang untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok marginal.

KESIMPULAN

Melalui pendekatan *Gendered Public Policy Analysis*, program PNM Mekaar terbukti berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Kampung Lette Romang Lompoa. Meski demikian, pemberdayaan ekonomi yang diberikan belum mampu secara langsung meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Tantangan utama yang muncul adalah adanya resistensi sosial terhadap perubahan peran gender yang sudah mapan, serta keterbatasan dalam pengelolaan keuangan oleh penerima manfaat. Norma-norma patriarkal yang masih kuat menjadi penghalang bagi perempuan untuk memanfaatkan kemajuan ekonomi sebagai langkah awal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik atau komunitas. Selain itu, kurangnya kemampuan mengelola keuangan dengan baik turut membatasi mereka dalam memaksimalkan manfaat ekonomi untuk memperkuat posisi di ruang publik dan politik. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh, seperti memberikan pelatihan berkelanjutan tentang kesetaraan gender dan manajemen keuangan, membuka akses lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang politik, serta membangun jaringan sosial yang mendukung solidaritas perempuan agar mampu menghadapi hambatan sosial yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan program PNM Mekaar tidak hanya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi tetapi juga mendorong terciptanya partisipasi politik perempuan yang lebih inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak yang telah membantu, khususnya tim PNM Mekaar yang menyediakan data dan informasi penting, serta para perempuan penerima manfaat yang berbagi pengalaman berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, kolega, dan teman-teman atas dukungan moral dan intelektual yang diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif untuk pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.

REFERENCES

- Ariani, K. F., Rahmawati, T. I., & Anggraini, D. V. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 118–128.
- Choerudin, A., Widyaswati, R., Warpindyastuti, L. D., Khasanah, J. S. N., Harto, B., Oktaviani, N. F., Sohilauw, M. I., Nugroho, L., Suharsono, J., Paramita, V. S., & others. (2023). Literasi Keuangan. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Evans, K., Monterroso, I., Ombogoh, D. B., Liswanti, N., Tamara, A., Mariño, H., Sarmiento Barletti, J. P., & Larson, A. M. (2021). *Bertindak dengan tepat, panduan untuk meningkatkan inklusi dalam forum multipihak*. CIFOR.
- Fairuza, H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi Political Awakening Perempuan: Komunitas Virtual sebagai Wujud Peran Pemuda Melalui Platform Internet sebagai Public Sphere dalam Era Digital. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>
- Handayani, W. (2018). Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan. *Muwazah*, 10(2), 198–224.
- Kabeer, N. (2014). *Gender & social protection strategies in the informal economy*. Routledge India.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Lister, R. (2003). Introduction: Why Citizenship? In *Citizenship: Feminist Perspectives* (pp. 1–10). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-0-230-80253-7_1
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyantini, S., & Indriasih, D. (2021). *Cerdas memahami dan mengelola keuangan bagi masyarakat di era informasi digital*. Scopindo Media Pustaka.
- PNM. (2020). *Laporan Tahunan PNM Mekaar*.
- Rahardjo, M. (2018). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Pedesaan: Studi Kasus di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Rizvi, S. (2015). *Women's Empowerment and Gender Equality in Asia*. Springer.
- Ruslan, M. (2010). Pemberdayaan perempuan dalam dimensi pembangunan berbasis gender. *Jurnal Musawa*, 2(1), 79–96.
- Sugiono. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta.
- Sundari, N. (2020). *Perempuan dan Keuangan Mikro: Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Rajawali.
- Terminanto, A. A. (2024). *Penguatan Keuangan Mikro Syariah Dengan Model Modifikasi Grameen Bank Syariah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan*. UIN Jakarta.
- Zalukhu, R. S., Hutaeruk, R. P. S., Collyn, D., Sinaga, M., Damanik, S. W. H., & others. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Faktor Usia dan Gender Terhadap Literasi Keuangan Pelaku UMKM di Kota Medan. *Accounting Progress*, 3(1), 36–48.